

Analisis Peran Aktor Politik Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan

Dahlianatalia Lumban Gaol¹ Richa Yohana² Halking³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

Email: dahliamarbun839@gmail.com¹

Abstrak

Perkembangan mengenai studi kebijakan publik menjadi akan semakin kuat sebagai akibat adanya perubahan lingkungan birokrasi publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai Analisis Peran Aktor Politik dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan oleh perangkat desa melalui Kepala Desa dan Kepala Dusun Di Desa Sampali dengan kualitas kebijakan yang baik pada saat ini dari segi kebijakan yang dibuat, banyak pembuatan kebijakan yang harus berdampak bagus bagi masyarakat.

Kata Kunci: Aktor Politik, Kebijakan

Abstract

The development of public policy studies will become stronger as a result of changes in the public bureaucratic environment. The purpose of this research is to find out about the Analysis of the Role of Political Actors in the Public Policy Formulation Process in Sampali Village, Percut Sei Tuan District. This research uses a type of qualitative research which is an approach in conducting research that is oriented towards natural phenomena or symptoms. Qualitative research is basic and naturalistic or naturalistic, and cannot be done in a laboratory, but in the field. The results of this study indicate that policies by village officials through the Village Head and Hamlet Head in Sampali Village with good policy quality at this time in terms of policies made, a lot of policy making must have a good impact on society.

Keywords: Political Actors, Politicies



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan mengenai studi kebijakan publik menjadi akan semakin kuat sebagai akibat adanya perubahan lingkungan birokrasi publik. Meningkatnya rasionalitas atau pemikiran di masyarakat sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan pada sosial ekonomi, telah memunculkan berbagai tantangan baru bagi birokrasi publik. Salah satunya, semakin besarnya tuntutan akan kualitas kebijakan yang lebih baik lagi. Hal ini mendorong munculnya minat untuk mempelajari studi kebijakan publik. Keinginan untuk mewujudkan otonomi daerah yang kuat juga mendorong perlunya perubahan orientasi pejabat birokrasi di daerah serta peningkatan kemampuan mereka pada perumusan dan perencanaan kebijakan dan program pembangunan. Semakin tinggi tipe isu kebijakan, masalah (problem) yang dirumuskan analisis menjadi semakin kompleks dalam arti, masalah yang muncul menjadi semakin saling bergantung, subyektif, buatan dan dinamis. Maka kajian terhadap aktor perumus kebijakan merupakan hal yang penting. Para aktor merupakan bagian penting dalam penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahapan-tahapan proses kebijakan (MH, 2016).

Peran aktor dalam membahasakan pemeran serta atau aktor-aktor dalam proses perumusan kebijakan, terdapat perbedaan penting yang perlu diperhatikan antarnegara maju dengan negara berkembang. Pada negara berkembang, struktur dalam pembuatan kebijakan cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan negara-negara maju. Kecenderungan akan struktur pembuatan keputusan dinegara-negara maju adalah dimana lebih kompleks dikarenakan kualitas hidup sudah menjadi isu yang utama saat pembuatan kebijakan (Salaputa et al., 2013). Pada perkembangannya, para teoritis elit telah mengalami persoalan kerangka kerja konseptualisasi. Kesulitan tersebut justru muncul berawal dari gagasan-gagasan teoritis elit klasik itu sendiri, dimana terminologi yang berbeda seringkali digunakan untuk menunjuk konsep yang sama dan terminologi identik tidak jarang digunakan dalam konsep-konsep yang cukup berbeda. Misalnya, Mosca (kelas sosial) secara berselang-seling menunjukkan gejala yang sama seperti “kelas politik” “kelas yang memerintah” dan “aristokrasi”, sementara Michels mengkaitkannya pada salah satu arti yaitu, “oligarki” (Siregar, 2018). Secara alamiah, hubungan negara dengan warga negara terikat dalam kontrak sosial, dimana negara sebagai sebuah institusi diberikan mandat formal oleh warga negaranya untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan publik. Kontrak sosial bersifat mengikat akan mewajibkan negara untuk menyediakan kebutuhan atau keinginan warga negara yang menentang dari hal-hal dasar dan material hingga hal-hal yang lebih fundamental maupun spiritual. Saat menjalankan mandat formal tersebut, negara yang diwakili pemerintah diberi otoritas untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Melalui berbagai kebijakan inilah diharapkan seluruh permasalahan mulai dari adanya kebutuhan, kepentingan, keinginan, serta nilai kepentingan masyarakat diwadahi, difasilitasi, dan diwujudkan (Winengan, 2018).

Secara bentuk leksikal aktor politik diantaranya diartikan menjadi Individu yang bercita-cita melalui cara-cara organisasi dan kelembagaan mempengaruhi proses pengambilan keputusan melalui capaian kekuasaan politik dalam pemerintahan atau konstitusional majelis melalui pilihan akan kebijakan dapat diimplementasikan. Dalam terminologi ilmu politik, yang termasuk aktor politik itu adalah orang atau individu pada sebuah organisasi politik, partai politik, organisasi publik. Pada monteks pengertian McNair tersebut, termasuk pula pihak-pihak interest group. Sementara menurut Nimmo (2004. :30) kriteria aktor politik itu ialah orang yang berbicara tentang politik atau dalam setting politik, seperti politikus, profesional, dan aktivis (Tawaang, 2016). Selain itu pada tahap perumusan kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar & Nugroho (2008:355) telah ditetapkan batas-batas kebijakan yang menyangkut sumberdaya waktu, kemampuan sumberdaya manusia, kelembagaan, dan dana atau anggaran (Wibowo, 2013). Adanya suatu perumusan suatu kebijakan publik sangat penting untuk didasarkan kepada tata pemerintahan yang baik (governance) dalam dua dekade terakhir, istilah "governance" menjadi perbendaharaan yang sering digunakan dalam diskusi administrasi publik dan demokrasi. Konsep governance telah menawarkan interaksi antara tiga aktor utama dalam perumusan suatu kebijakan, aktor tersebut adalah negara (state), masyarakat (society) dan sektor swasta (private). Governance merupakan basis penyelenggaraan otonomi lokal, pemerintahan lokal yang kuat dan otonom tidak akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat apabila tidak di topang oleh transparansi, akuntabilitas, responsivita dan partisipasi masyarakat. Secara pemikiran teoritis, prinsip penting yang menjadi pilar dalam struktur itu ditandai oleh adanya; (a) partisipasi; (b) transparansi; (c) kontrol dan; (d) akuntabilitas (Bailusy, 2015). Aktor politik harus mengoperasionalkan perannya, perlu memiliki political skill yang berbasis pada knowledge. Pengetahuannya sebagai padanan kata yang cocok untuk knowledge, menurut Hay (2001) knowledge adalah elemen yang digunakan oleh aktor politik untuk mengidentifikasi diri sang aktor kepada the others (pihak di luar sang aktor). Elemen tersebut penting karena

sebagai basis kekuatan sang aktor dalam membangun kekuasaannya, yaitu dalam hal ini dibangun di level dimana sang aktor politik berpijak (Arsyad et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan (Turap et al., n.d.). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara berstruktur atau berstandar dimana wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya (Rachmawati, 2007). Observasi merupakan pengamatan oleh peneliti yang dilakukan dengan langsung turun ke lapangan. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui sumber seperti dokumen, buku, jurnal dan karya tulis lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kualitas Kebijakan Desa Sampali

Kebijakan oleh perangkat desa melalui Kepala Desa Sampali dengan kualitas kebijakan yang baik pada saat ini dari segi kebijakan yang dibuat, banyak pembuatan kebijakan yang harus berdampak bagus bagi masyarakat. Kepala Desa sebagai aktor dalam pembuatan kebijakan akan tetap mengutamakan musyawarah dan diskusi dengan para Kepala Dusun, perangkat Desa lainnya serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terkhusus nya dalam pembangunan desa karena dalam pembangunan desa harus memiliki skala prioritas dimana di desa terdiri dari 25 Dusun. Pada Kepala Dusun hasil wawancara dengan mengambil kebijakan dengan mendengar keluhan dan penyelesaian masalah di Dusun masing-masing. Keadaan setiap Dusun sudah termasuk baik, bagus dan terkendali. Setiap masalah akan dipecahkan, kerjasama dan musyawarah akan diutamakan dalam lingkungan Dusun.

Peran Penting Aktor Politik

Di Desa Sampali memiliki kepala Dusun yang mengikuti organisasi masyarakat dengan fokus pada netral, dengan keputusan dan kebijakan tersendiri. kepala Desa, Perangkat Dusun dan Perangkat Desa Lainnya tidak boleh mengikuti partai, hanya pada perumusan kebijakan untuk Desa seperti Organisasi Masyarakat dan fokus utama pada pekerjaan sebagai Perangkat Desa. Namun, pada dasarnya tetap akan ikut dalam aturan di Desa. Dimana, hanya masyarakat diluar perangkat desa dan perangkat Dusun akan dapat juga menjadi anggota partai maupun badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada kepala Dusun Desa Sampali akan mengayomi masyarakat dan netral. Namun, pada dasarnya Kepala Dusun akan juga berfokus pada Dusun. Kepala Dusun menganggap bahwasanya fokus utama hanya bidang tertentu dan tidak ikut andil mengambil bagian pada aktor politik seperti badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Pengaruh Dari Aspek Politik, Ekonomi, dan Sosial Dalam Pembuatan Kebijakan

Kebijakan akan memiliki manfaat signifikan kepada orang banyak. Namun, dapat ditemui bahwasanya pada perumusan kebijakan akan terdapat pro dan kontra di masyarakatmasyarakat. Perumusan kebijakan Desa harus melalui musyawarah dan tidak menguntungkan pihak tertentu dan keputusan oleh Kepala Desa memang berasal dari musyawarah tersebut. Bidang ekonomi penting dalam kebijakan dimana mengikuti perkembangan dari stabilitas ekonomi. Selain itu pada Dusun umumnya memiliki warga

dengan perekonomian dari menengah kebawah. Namun, pengaruh dalam bidang-bidang tersebut tidak ditemukan dalam perumusan kebijakan.

Peran Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan

Peran besar masyarakat seperti mengusulkan pengajuan-pengajuan pada Dusun masing-masing (fisik maupun non fisik). Contohnya penanganan Stunting dan juga pembangunan jalan. Pembuatan proposal akan dirundingkan dan didiskusikan kembali oleh perangkat Desa dan perangkat Dusun dengan pengajuan keputusan tentang proposal. Peran masyarakat menurut kepala Dusun sangat berperan, karena dalam pembuatan kebijakan benar-benar di diskusikan. Dimana paling diutamakan dalam proses musyawarah dan gotong royong seperti dalam fasilitas dan lingkungan yang mana sesuai kebutuhan di Dusun.

Tantangan dan Hambatan dalam Pembuatan Kebijakan

Pro dan Kontra menjadi salah satu tantangan dalam pembuatan kebijakan dikarenakan tidak semua masyarakat akan pro/mendukung dalam pembuatan kebijakan dan harus diutamakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar baik untuk keseluruhan. Kebutuhan akan masyarakat akan dipikirkan dengan matang dan tetap melalui musyawarah. Dimana pendapat Kepala Dusun di ibaratkan menjadi jembatan dalam penyampaian di masyarakat. Selain itu, akan terdapat beberapa masyarakat yang tidak setuju sehingga pada perumusan kebijakan harus benar-benar pada kebutuhan masyarakat. Kepala Dusun pada hasil wawancara dalam beberapa Dusun berjalan lancar dan tidak memiliki hambatan.

Pembahasan

Strategi Kebijakan Pelayanan Publik

Strategi pelayanan publik dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut (Kinerja et al., 2023):

1. Memberikan suatu pengarahan kepada setiap aparat menggunakan model orientasi, model komando, dan model delegasi,
2. Mengarahkan pimpinan dengan melalui forum rapat serta pertemuan rutin dengan aparat agar aparat berjalan sesuai SOP dan peran serta fungsinya masing-masing,
3. Meningkatkan pelayanan, kedisiplinan, dan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.
4. Para petugas pelayanan diingatkan agar mematuhi waktu pelayanan dan memenuhi segala permintaan berkas yang telah diajukan sebelum meninggalkan kantor
5. Memberikan pelatihan secara berkala kepada aparatur,
6. Menjaga keharmonisan hubungan antar aparatur/petugas, saling menegur dan mengingatkan jadwal dinas dan konfirmasi berkas yang masuk
7. Melakukan suatu kajian kinerja, pemantauan, dan pengembangan personel secara rutin/bulanan,
8. Mengadakan koordinasi dengan rapat bulanan dengan seluruh bidang/unit,
9. Menjamin konsumen jasa bahwa datanya sudah masuk ke dalam sistem/server,
10. Pelayanan dengan senyum, sapa, dan tidak mengabaikan norma yang berlaku,
11. Setiap hari kerja mengadakan apel pagi

Partisipasi Masyarakat

Menurut Creighton adanya partisipasi masyarakat merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap yang berkelanjutan. Tahapan tersebut dapat meliputi memberikan informasi kepada publik, mendengarkan publik, melibatkan publik dalam proses pemecahan

masalah, dan juga mengembangkan argumentasi. Proses tersebut adalah suatu bagian integral dari sistem pemerintahan demokrasi (Rachmat & Silitonga, 2023). Deputy Bidang Pelayanan Publik yang menjelaskan lebih spesifik bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik melalui penyelenggaraan beberapa fungsi spesifik, yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik;
2. Koordinasi dengan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan publik;
4. Penyusunan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberian penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan sistem informasi pelayanan publik serta koordinasi pengelolaan pengaduan secara nasional;
6. Pelaksanaan administrasi dengan Deputy Bidang Pelayanan Publik; dan
7. Adanya pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan oleh perangkat desa melalui Kepala Desa Sampali dengan kualitas kebijakan yang baik pada saat ini dari segi kebijakan yang dibuat, banyak pembuatan kebijakan yang harus berdampak bagus bagi masyarakat. Dalam pembuatan kebijakan maka diperlukan adanya strategi perumusan kebijakan, stabilitas yang baik dan segala kebijakan yang dibuat di musyawarahkan dan didiskusikan untuk memberikan pertimbangan dalam mengimplementasikan, merumuskan Kebijakan di Masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu pada proses penelitian ini baik dalam pengumpulan data dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, D., Shibghotulloh, M., Al-Banjari, H., & Djuyandi, Y. (2020). Peran Aktor Dalam Proses Pembentukan Dinasti Politik (Studi Kasus Di Kabupaten Purwakarta). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 26–48. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2931>
- Bailusy, M. K. (2015). *247-355-1-PB(1).pdf*. 1(2), 191–202.
- Kinerja, A., Pemerintah, P., Ambon, K., & Selly, R. N. (2023). [http://stp-mataram.e-journal.id/JHI.12\(1\)](http://stp-mataram.e-journal.id/JHI.12(1)).
- MH, I. (2016). Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik Sholih Muadi, Konsep Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Univeristas Sofwani, Ahmad. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1078>
- Rachmat, R., & Silitonga, M. S. (2023). Strategi Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik (PermenPANRB nomor 16 tahun 2017). ... dan *Administrasi Publik*, 5(2), 1–10. <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jpap/article/view/687>
- Rachmawati, I. N. (2007). Data Collection in Qualitative Research: Interviews. *Indonesian Journal of Nursing*, 11(1), 35–40.
- Salaputa, I., Madani, M., & Prianto, A. L. (2013). Peran Aktor Dalam Penyusunan Agenda Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Maluku Tengah. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 35–47. <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.56>

- Siregar, H. (2018). Studi Kebijakan Politik: Aktor dan Isu Dalam Proses Pengambilan Keputusan. *Jurnal Communitarian*, 1(1), 87–100. <https://doi.org/10.56985/jc.v1i1.75>
- Tawaang, F. (2016). Representasi Aktor Politik Dalam Agenda Media (Analisis Agenda Setting Terhadap Headline Surat kabar Ibukota). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 20(2), 227–240.
- Wibowo, U. B. (2013). Intensitas Peran Aktor Kebijakan dan Kekuatan Politis dalam Perumusan Kebijakan Sertifikasi Pendidik. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 6(1), 11–20.
- Winengan. (2018). Dinamika Perumusan Kebijakan Publik. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.